

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Sritini¹, Khairul Rizal², Nurkolis³

sritini42@gmail.com¹, nahathhussaini@gmail.com², nurkolis@upgris.ac.id³

Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan yang mencakup cara memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana pendidikan. Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, yang harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip keadilan menekankan pentingnya distribusi anggaran yang merata tanpa diskriminasi terhadap suku, ras, agama, jenis kelamin, kemampuan, atau status sosial-ekonomi. Selain itu, keadilan juga mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Makalah ini akan membahas penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, Keadilan, Efisiensi.

PENDAHULUAN

Salah satu studi di bidang Pendidikan dikenal sebagai pembiayaan Pendidikan, yang membahas cara sumber biaya diperoleh, bagaimana sumber biaya itu digunakan, dan tanggung jawab atas penggunaan dana tersebut (Ritonga, 2017). Oleh karena itu, pembiayaan Pendidikan menjadi sangat penting. Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pembiayaan Pendidikan.

Pendidikan yang merata dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, kemampuan, atau status sosial-ekonomi adalah prinsip keadilan. Menurut (Asnil Aida Ritonga, Yusuf Hadi Jaya, 2023), keadilan yang juga dikenal sebagai keseimbangan atau keseimbangan, membutuhkan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh komunitas.

Prinsip-prinsip pembiayaan Pendidikan yaitu prinsip, keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pada makalah kali ini akan membahas tentang penerapan prinsip-prinsip pembiayaan Pendidikan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Untuk menerapkan Prinsip-prinsip pembiayaan Pendidikan dengan cara berikut.

a. Keadilan

Memberikan akses pelayanan Pendidikan seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik tanpa diskriminasi.

b. Efisien dan Efektif

Mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pelayanan Pendidikan.

c. Transparansi

- Memenuhi asas kepatuhan dan tata Kelola yang baik (dapat diaudit secara standar, dipertanggung jawabkan secara transparan)
- Mencatat dan melaporkan semua transaksi pendapatan dan pengeluaran.
- Penerapan prinsip transparan akan menciptakan kepercayaan timbal baik antara pemerintah, masyarakat, orangtua murid, dan masyarakat.
- Laporan Keuangan dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun

d. Akuntabilitas

- Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan Pendidikan kepada pemangku kepentingan Pendidikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
 - Belanja dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat
 - Hanya ada 1 laporan RKAS/RKAM
2. Efektivitas penerapan prinsip-prinsip penerapan pembiayaan pendidikan
- a. Keadilan dalam pembiayaan Pendidikan
- Pembiayaan Pendidikan diperoleh dari BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan). Perencanaan penggunaan anggaran mempertimbangkan prinsip keadilan. Perencanaan yang sedemikian rupa sehingga kebermanfaatan dari pembiayaan yang dilakukan dapat dinikmati semua warga sekolah.
- b. Efisiensi dalam pembiayaan Pendidikan
- Anggaran direncanakan secara matang tentang kebermanfaatannya. Penggunaan anggaran selalu difokuskan kepada peningkatan hasil belajar siswa baik itu hasil kognitif, afektif, maupun psikomotor.
- c. Transparansi dalam pembiayaan Pendidikan
- Pemasangan papan data di sekolah, sehingga memudahkan seluruh warga sekolah mengakses laporan keuangan sekolah.
- d. Akuntabilitas publik dalam pembiayaan Pendidikan
- Penggunaan anggaran Pendidikan harus sesuai dengan perencanaan yang dibuat di RKAS. Kegiatan di sekolah direncanakan di awal tahun sehingga dapat dibiayai dengan anggaran BOSP.
3. Dampak/hasil penerapan prinsip-prinsip pembiayaan Pendidikan
- a. Salah satu dari Gerakan reformasi Pendidikan adalah desentralisasi dan otonomisasi Pendidikan. Pemerintah telah berusaha untuk mencapai dan mempercepat regulasi kesetaraan dan system pendanaan Pendidikan. Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semua warga negara Indonesia berhak atas Pendidikan dan pengajaran, baik “kaya” maupun “miskin”, dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. (Ninggolan et.al, 2021). Keadilan berarti keadilan dalam kesempatan Pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok masyarakat. Persamaan juga berarti kesempatan yang sama untuk Pendidikan (Sukatin et al., 2023) menyatakan bahwa keadilan berarti meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi siswa untuk mencapai hasil terbaik. Penerapan prinsip “keadilan” pada pembiayaan Pendidikan dalam perencanaan penggunaan keuangan sekolah harus selalu direncanakan agar semua warga sekolah dapat menikmati kebermanfaatan dari penggunaan anggaran tersebut.
- b. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan terbaik antara masukan (input) dan pengeluaran (output). Pikiran, waktu, biaya adalah sumber daya yang diperlukan. Dilihat dari penggunaan daya, kegiatan Pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya namun mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dari segi hasil, kegiatan Pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas.
- c. Transparansi berarti pengelolaan keuangan yang terbuka, mulai dari pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pembiayaan Pendidikan. Sangat penting bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tentang keadaan keuangan. Dampak dari transparansi adalah membantu meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program Pendidikan. Selain itu, transparansi akan meningkatkan kepercayaan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah satu sama lain karena memberi mereka kemudahan untuk mengakses informasi pembiayaan

Pendidikan.

- d. Dengan akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan Pendidikan, pengeluaran Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana. Tiga syarat utama untuk akuntabilitas public adalah sebagai berikut. (1) penyelenggara Pendidikan harus terbuka tentang masukan mereka dan keikutsertaan mereka di berbagai bagian sekolah, (2) harus ada standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, dan (3) harus ada komitmen Bersama untuk menciptakan suasana sekolah yang baik dengan prosedur yang mudahh, murah, dan cepat. (Komariah, 2018). Dari sumber dana BOSP, pihak sekolah dituntut harus bertanggung jawab dalam penggunaan dana yang diterima sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas publik.

KESIMPULAN

Pembiayaan Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan di sekola. Dalam melaksanakan pengelolaan anggaran diperlukan prinsip-prinsip pembiayaan Pendidikan. Terdapat empat prinsip pembiayaan Pendidikan yang dijadikan pedoman yaitu prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas publik. Ketika keempat prinsip tersebut dijalankan, maka pembiayaan Pendidikan akan terealisasi dengan sangat baik. Sesuai dengan pepatah bahwa Kegagalan Merencanakan=Merencanakan Kegagalan dan cara terbaik menebak masa depan adalah dengan menciptakannya dengan Perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnil Aida Ritonga, Yusuf Hadi Jaya, S. S. (2023). Fungsi Manajemen Pendidikan Islam. Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislamana.
- Nainggolan, L.E., Purba, B., Sudarmanto, E., Nanggolan, P., Hasibuan, A., Simarmanta, H., M., P., & Damanik D. (2021). Ekonomi Sumber Daya Manusia Manusia. In Raya Grafindo Persada, Jakarta.
- Nuriyah, F.S, & Deca D. (2023). Pengelolaan dan Pengfgalokasian Dana di Lembaga Pendidikan. Jurnal Global Futuristik. <https://doi.org/10.59996/gloibalistik.vli2.214>.
- Nuryadin, M. R., Rahayu, D., & Muzdalifah, M. (2020). EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN. ECOPLAN : JOURNAL OF ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i1.82>
- Samiyatun, S. (2022). Penerapan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Pada Kelas VII. Dharmas Education Journal (DE_Journal), 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.56667/dejournal.v3i1.618>
- Sukatin, Danny, M. A. F., Huda, R. M., & Fajria, Z. I. (2023). MANAJEMEN KURIKULUM DAN EVALUASI. Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan. <https://doi.org/10.24252/edu.v2i2.35257>.